

LAPORAN HASIL KERJA PRAKTEK (KP)

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013-
2017 DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



DISUSUN OLEH :

RIZKI WAHYUNIGSIH

1712110359

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

2020

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2013-2017 DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Rizki Wahyuningsih

1712110359

Telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan



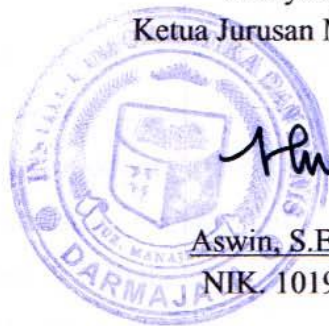
Betty Magdalena, S.Pd, M.M
NIK.12100111

Pembimbing Instansi



Ricky Airlangga, S.H, M.M
NIP.198311162009021003

Menyetujui,
Ketua Jurusan Manajemen



Aswin, S.E, M.M
NIK. 10190605

ABSTRAK

Laporan yang berjudul “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Tahun 2013-2017” ini merupakan hasil analisis kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2013 hingga 2017.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan informan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan BAPENDA, Staff BAPENDA, Kepala Sub Bidang Anggaran I BPKAD, dan Staff Bidang Pendataan dan Penagihan UPT PPD Provinsi Lampung.

Hasil laporan menjelaskan bahwa wujud nyata dari pemenuhan hak untuk setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah adalah dengan melakukan penggalan sumber dana Pendapatan Asli Daerah, sehingga daerah dianggap mampu untuk mengelola dan mengalokasikannya. Dana Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pemungutan pajak yang merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan setiap warga negara yang bersifat memaksa, seperti Pajak Kendaraan Bermotor. Kontribusi dari sektor pajak daerah sangat memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang baik dan potensial dalam menopang Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk memaksimalkan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya serta keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak, sehingga penerimaan pajak dari tersebut bisa lebih maksimal dan semakin berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

RIWAYAT HIDUP

1. Identitas


- a. Nama : Rizki Wahyuningsih
- b. NPM : 1712110359
- c. Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 14 September 1999
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Jl. Haji Komarudin Gang Abadi II no.20
Rajabasa Raya, Bandar Lampung
- f. Kewarganegaraan : Indonesia
- g. E-mail : rizkiwn96@gmail.com
- h. No. Telp : 081995170151

2. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar :	SD Al-Kautsar Bandar Lampung
Sekolah Menengah Pertama :	SMP Negeri 22 Bandar Lampung
Sekolah Menengah Atas :	SMA Negeri 9 Bandar Lampung

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan di atas adalah benar.

Bandar Lampung, 30 September 2020



Rizki Wahyuningsih
NPM. 1712110359

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan kasih-Nya penulis mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas kerja praktek di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (BAPENDA) selama 2 bulan terhitung sejak Agustus hingga September.

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Informatika dan Informatika Darmajaya Bandar Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini banyak sekali tantangan dan hambatan yang menghampiri, namun dengan bantuan dari berbagai pihak kendala tersebut dapat teratasi. Semoga uluran tangan mereka mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan yang Maha Esa.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kelancaran dan kemudahan kepada saya dari awal penyusunan laporan kerja praktek hingga dapat selesai.
2. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung segala aktivitas saya dan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk saya.
3. Bapak Hi. Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
4. Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz, ST., M.T selaku Wakil Rektor I Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
5. Bapak Ronny Nazar , S.E, M.M selaku Wakil Rektor II Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
6. Bapak Muprihan Thaib, S.Sos., M.M selaku Wakil Rektor III Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
7. Bapak Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, Phd selaku Wakil Rektor IV Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
8. Ibu Aswin, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Manajemen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

9. Ibu Betty Magdalena, S.Pd, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, saran-saran serta ilmu yang sangat berharga dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini sampai penulisan laporan Kerja Praktek.

10. Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (BAPENDA) selaku instansi yang telah memberikan kesempatan untuk mendapat pengalaman ilmu tentang dunia kerja.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari kata sempurna baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Atas kekurangan ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat menyempurnakan laporan ini.

Akhir kata semoga laporan kerja praktek ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya penulis dan umumnya bagi yang membacanya.

Terimakasih

Bandar Lampung, 30 September 2020



Rizki Wahyuningsih
NPM. 1712110359

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	2
RIWAYAT HIDUP	4
PRAKATA	5
BAB I	9
PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Ruang Lingkup Kerja Praktek	12
1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	13
1.4.1 Jadwal waktu praktik kerja lapangan	14
1.4.2 Tempat Pelaksanaan	14
1.5 Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
GAMBARAN UMUM	16
2.1 Sejarah Instansi	16
2.2 Visi dan Misi Instansi	16
2.3 Lokasi Instansi	17
2.4 Struktur Organisasi	17
BAB III	22
PERMASALAHAN INSTANSI	22
3.1 Analisa permasalahan di Instansi	22
3.2 Rumusan Masalah	22
3.3 Metode Penelitian	23
BAB IV	24
HASIL DAN PEMBAHASAN	24

4.1 Hasil	24
4.2 Pembahasan.....	25
BAB V.....	28
PENUTUP	28
5.1 Kesimpulan.....	28
5.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena dapat melihat sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan dan pembangunan daerah itu sendiri sesuai dengan era saat ini yakni otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk orientasi terhadap pembangunan. Otonomi daerah merupakan hak dimana daerah wajib untuk turut serta melancarkan jalannya pembangunan yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber dari dana perimbangan yang berasal dari APBN dan pinjaman daerah. Pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, sehingga sektor-sektor tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan kemandirian daerah. Sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali dan dimanfaatkan secara maksimal dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki fungsi untuk memuaskan dan memenuhi segala kepentingan umum yang berkaitan dengan masyarakat luas. Fungsi ini dapat tercapai melalui program-program pemerintah daerah yang pembiayaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program program yang dijalankan pemerintah daerah tidak lain adalah untuk membangun daerah itu sendiri sehingga kesejahteraan seluruh masyarakatnya dapat tercapai. Contoh program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah yang sedang gencar saat ini adalah pembangunan jalan tol yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat melakukan perjalanan dari daerah satu ke daerah lainnya dengan jarak tempuh waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan melakukan perjalanan dengan menggunakan jalur jalan raya pada umumnya. Selain itu, kepentingan masyarakat dapat segera terpenuhi karena lalu lintas jalan tol yang tidak padat, misalnya masyarakat dari daerah yang akan mendistribusikan buah dan sayurannya ke pasar induk Keputran di Surabaya, kini buah dan sayur akan tiba lebih cepat dan konsumen akan mendapatkan buah dan sayur yang lebih segar dan tidak layu.

Masyarakat cenderung menggunakan kendaraan bermotor karena jenis kendaraan ini dinilai lebih efektif untuk mereka kendarai guna mendukung mobilitas masyarakat yang

padat. Sebagian besar orang lebih memilih untuk bepergian menggunakan kendaraan bermotor yang lebih efektif dan mampu menjangkau wilayah-wilayah tertentu dibandingkan dengan kereta, pesawat, kapal, dan lain-lain yang hanya dapat diakses di beberapa wilayah dan memiliki waktu khusus untuk keberangkatan. Padatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Perekonomian suatu daerah bergantung terhadap pendapatan pajak. Pajak merupakan sarana untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur serta mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktifitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan. Selain itu, pajak merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat nantinya digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan infrastruktur publik di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali Provinsi Lampung yang memiliki penduduk yang padat dan kendaraan bermotor yang juga sangat padat. Padatnya kendaraan bermotor memiliki manfaat tersendiri untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung. Pemerintah harus membuat masyarakat percaya bahwa pembayaran pajak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan negara. Pemerintah harus pandai menempatkan diri agar masyarakat turut percaya kepada pegawai pajak atau orang pajak yang ditunjuk untuk melakukan penarikan pajak. Selain itu, sistem pembayaran pajak harus dipermudah sehingga masyarakat terbebas dari kerumitan proses pembayaran pajak yang perlahan-lahan akan meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang perannya sangat strategis untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan dikelola untuk dipergunakan kembali guna memenuhi kebutuhan daerah sehingga tercapai kemakmuran rakyat. Daerah sangat membutuhkan pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pembangunan jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pemerintahan daerah lainnya. Menyadari betapa pentingnya pajak daerah untuk membiayai daerah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, maka kesadaran masyarakat akan pajak harus ditingkatkan kembali.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi negara. Sebesar 70% penerimaan negara berasal dari pajak dan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Pajak telah memberikan kontribusi yang besar dan peranan yang penting mulai dari belanja pemerintah, belanja pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran infrastruktur, dan lain-lain. Maka dari itu, sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak merupakan benar.

Pungutan pajak daerah bersifat wajib dari masyarakat oleh pemerintah yang sifatnya dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna membiayai keperluan pemerintahan dan pembangunan. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi pajak

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan, untuk jenis pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beserta gandengannya yang digunakan di darat, dan digerakkan oleh mesin motor atau mesin lainnya yang berfungsi mengubah energi tertentu menjadi tenaga gerak motor. Alat-alat berat, alat-alat besar, dan kendaraan yang dioperasikan di air termasuk kedalam kategori kendaraan bermotor karena dioperasikan dengan menggunakan roda dan motor. Yang termasuk kedalam kategori kendaraan bermotor yang dikenakan pajak meliputi: (1) sepeda motor; (2) sedan dan sejenisnya; (3) jeep; (4) station wagon dan sejenisnya; (5) bus dan microbus; (6) truk, pick-up, dan sejenisnya; serta (7) alat berat. Seluruh kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan termasuk dalam obyek diatas maka masuk dalam pungutan pajak kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi paling rendah 1% dan paling tinggi 10%. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk angkutan umum, ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil sosial dan keagamaan, mobil pemerintahan, serta segala jenis kendaraan kepolisian dan TNI dikenakan tarif paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%. Sedangkan, tarif pajak kendaraan bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh melalui berbagai sumber, salah satunya adalah dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menjadi mobilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi khususnya di Provinsi Lampung. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung melakukan program yang dapat memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Pembayaran pajak kendaraan bermotor di Lampung dapat dilakukan di keramaian seperti pusat-pusat perbelanjaan seperti mall dan minimarket, lapangan, dan event-event tertentu yang mengundang antusiasme masyarakat. Selain itu, peran samsat keliling juga sangat membantu penerimaan pajak kendaraan bermotor terlebih untuk mereka yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk datang dan antri di samsat induk. Segala pelayanan Pemerintah Provinsi Lampung yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak senantiasa untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berpengaruh terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pula.

Jenis pajak tersebut merupakan jenis pajak daerah/provinsi dimana pungutannya masuk ke dalam penerimaan provinsi. Pajak tersebut dipungut oleh masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Lampung oleh Dinas Pendapatan Daerah kemudian diserahkan kepada Badan Pendapatan (BAPENDA) Provinsi Lampung dan dilakukan bagi hasil untuk

kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2010 serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor 188/158/KPTS/013/2016. pajak tersebut memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung sehingga mampu menjadi provinsi yang mandiri dengan mengelola keuangan dengan baik tanpa harus menunggu bantuan dan transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian yang dimaksud dalam hal ini adalah mandiri dalam melakukan perencanaan maupun pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Semakin tingginya tingkat kemandirian suatu provinsi maka akan semakin kuat ketahanan ekonomi daerah tersebut dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional maupun internasional, seperti pengeluaran pemerintah, kelemahan ekonomi pasar, pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan. Hal ini nantinya akan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan bantuan dari pemerintah pusat.

Adanya kontribusi pajak kendaraan bermotor dapat mengetahui seberapa besar peran pajak kendaraan bermotor pada pendapatan daerah, sehingga pengelola pajak daerah setiap tahunnya dapat melakukan evaluasi pada pajak kendaraan bermotor sehingga dapat menjadi pembelajaran selanjutnya. Dari beberapa hal diatas mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, maka penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai kontribusi dari pajak kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul **“Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Tahun 2013-2017”**.

1.2 Ruang Lingkup Kerja Praktek

Program Kerja Lapangan (KP) dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaan KP di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung ditempatkan di bagian retribusi dan penerimaan dan lain-lain yang dilaksanakan mulai tanggal 3 agustus s/d 30 september 2020, yang berlangsung dengan baik dan lancar.

1.3Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tahun 2013-2017.

2. Untuk menjelaskan kontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung 2013-2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan laporan ini, maka laporan ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat adalah:

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis

laporan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Mengetahui target, realisasi, serta kontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung
- b. Sebagai referensi dan literatur bahan bacaan bagi perpustakaan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, serta sebagai pedoman bagi mahasiswa mengenai pajak kendaraan bermotor.
- c. Sebagai bentuk informasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai peran pajak kendaraan bermotor terhadap sumber pendapatan daerah yang potensial, yakni pajak.

2. Manfaat Praktis Secara praktis

laporan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan rutin dalam membayar pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1.4.1 Jadwal waktu praktik kerja lapangan

Waktu praktik kerja lapangan dilakukan selama 2(bulan). Terhitung sejak tanggal 3 Agustus s.d 30 September 2020. Waktu mulai praktek kerja dimulai dari hari senin – jumat dari jam 08.00 – 15.30.

1.4.2 Tempat Pelaksanaan

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Sultan Hasanudin No.45, Gn. MAS, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung
35221

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan, penulis menjelaskan secara singkat mengenai alur dan isi penelitian dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan pelaksanaan, sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran umum instansi

penulis menjabarkan sejarah instansi, visi misi dan struktur organisasi.

BAB III Permasalahan instansi

penulis menguraikan data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Dalam bab ini data pelaksanaan harus lengkap dan memenuhi untuk dianalisis yakni mengenai pajak kendaraan bermotor serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

BAB IV Hasil dan pembahasan

penulis menjelaskan analisis berdasarkan data penelitian dan dideskripsikan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian dengan pengetahuan yang tepat dan sesuai.

BAB V Penutup

penulis memberikan kesimpulan mengenai masalah dan pembahasan hasil laporan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis masih mengalami keterbatasan dalam pelaporan sehingga memerlukan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sehingga dapat berguna bagi penulis, masyarakat, lembaga, pemerintah Provinsi Lampung, serta laporan selanjutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Instansi

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Lampung yang terletak di Jl. Sultan Hasanudin No.45, Gn. MAS, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung. BAPENDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang keuangan. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan
5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Visi dan Misi Instansi

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung :

- a. Visi Instansi
Mewujudkan Provinsi Lampung lebih sejahtera dan berakhlak melalui kemandirian fiskal dan pelayanan publik.

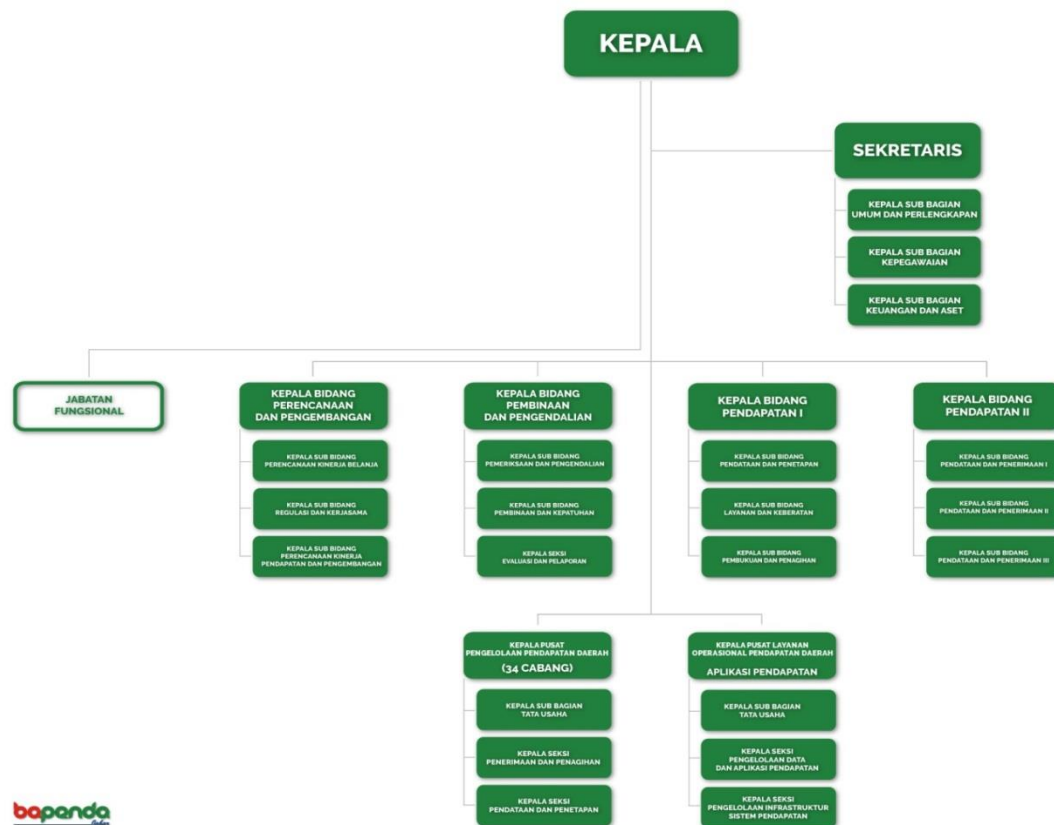
b. Misi Instansi

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Meningkatkan kualitas pelayanan public

2.3 Lokasi Instansi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terletak di Jl. Sultan Hasanudin No.45, Gn. MAS, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.

2.4 Struktur Organisasi



Kedudukan dan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 terdiri atas:

- a. Badan Pendapatan Daerah
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Perlengkapan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang perencanaan dan Pengembangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Penyusunan Program dan Perencanaan Anggaran
 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan
 3. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan
- d. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 2. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
 3. Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak
- e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi:
 1. Sub Bidang Retribusi
 2. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak
 3. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain
- f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi
 2. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
 3. Sub Bidang Evaluasi Kinerja g. UPT Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional .

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Daerah, dan Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dengan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

a. Tugas dan Fungsi Bagian Kesatu “Badan” Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Badan memiliki tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang keuangan. Selain itu Badan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan
- 5) Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Tugas dan Fungsi Bagian Keempat “Bidang Pajak Daerah” Pasal 9 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016

Bidang Pajak Daerah memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah. Sedangkan, fungsi dari Bidang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah dari pendataan, pengenaan, penetapan, pembatalan, keringanan, pengurangan, pembayaran, penagihan, insentif, pembebasan dan piutang pajak daerah
- 2) Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran
- 3) Perumusan kebijakan teknis pelayanan dan keberatan pajak daerah (doleansi)

- 4) Perumusan kebijakan teknis sebagai dasar penetapan pajak daerah
- 5) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, penyusunan, pengolahan, dan penyampaian laporan data subjek dan objek pajak daerah
- 6) Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak daerah (doleansi) dan pengaduan pelayanan
- 7) Pengoordinasian kebijakan pajak daerah dengan instansi terkait
- 8) Pelaksanaan penyusunan kajian pemungutan pajak daerah
- 9) Perumusan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah pada tahun berjalan
- 10) Pelaksanaan sosialisasi, publikasi inovasi pelayanan publik pemungutan pajak daerah
- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pelayanan publik dan pemungutan pajak daerah
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

c. Tugas Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2016 Pasal 10, antara lain:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
- 2) Menyiapkan bahan penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek pajak serta perkembangannya
- 3) Menyiapkan bahan penyiapan bahan perumusan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; serta bahan perumusan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 4) Menyiapkan bahan penyiapan bahan usulan produk hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 6) Menyiapkan bahan data dan kajian untuk mendukung penyusunan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- 7) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama perpajakan dengan instansi terkait lainnya
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sub Bidang
- 9) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugas
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

C. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang besar. Hal ini tentunya harus didukung dengan pemerintahan yang baik dan tertata supaya dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap potensi yang dimiliki harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan hasil yang baik pula. Berbagai peluang harus digali demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang keberadaannya harus dimaksimalkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN INSTANSI

3.1 Analisa permasalahan di Instansi

Identifikasi Masalah Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah terdapat beberapa permasalahan yang muncul mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, diantaranya adalah:

1. Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hal ini menyebabkan peningkatan volume kendaraan bermotor di jalan raya.
2. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor memiliki dampak yang baik bagi penerimaan daerah Provinsi Lampung, khususnya dalam bidang Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah.
4. Pemungutan pajak daerah dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Pemerintah memiliki peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak sehingga penerimaan pajak daerah dapat dimaksimalkan.
6. Target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung pada tahun 2013- 2017.
7. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Lampung tahun 2013-2017

3.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tahun 2013-2017?
2. Bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2013-2017?

3.3 Metode Penelitian

Data laporan ini memakai Data primer dan sekunder, data yang didapatkan penulis dari sumber yang telah ada dalam bentuk laporan tahunan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung. Data-data tersebut berupa:

- a. Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2013-2017 yang kemudian disahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- b. Data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tahun 2013- 2017.
- c. Data jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tahun 2013-2017.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan sangat baik dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai kepentingan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat masing-masing daerah perlu menetapkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah pada hakikatnya adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang. Masyarakat yang membayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan memakmurkan masyarakat daerah setempat. Pajak daerah juga merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak untuk setiap daerah sehingga dapat melaksanakan otonomi daerahnya sendiri secara mandiri dengan melakukan penggalian dana Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dalam otonomi daerahnya sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah itu sendiri yang lebih mengerti kondisi dan keadaan daerahnya masing-masing, sehingga dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran telah dimaksimalkan untuk sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada sistem ini pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut merupakan penerimaan yang penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung, mengingat penerimaan keduanya merupakan yang tertinggi, sehingga keduanya memiliki peranan yang cukup penting dan krusial dalam mewujudkan pembangunan daerah serta meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum untuk masyarakat. Setiap tahunnya, pemerintah daerah selalu memiliki rencana pembangunan dan rencana anggaran yang akan dikeluarkan untuk memenuhi pembiayaan daerah, sehingga pemerintah daerah pasti telah memiliki daftar prioritas yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pemerintah daerah juga mengerti kondisi daerahnya sendiri sehingga dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran pasti telah menimbang-nimbang rencana tersebut dari berbagai sisi. Rencana yang dimiliki daerah setiap tahunnya memiliki pengaruh terhadap target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target yang ditetapkan setiap tahun harus dapat dipenuhi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan target penerimaan setiap tahunnya oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. tahun 2013 adalah sebesar Rp 3.594.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 3.896.189.871.560.
- b. Tahun 2014 target yang ditetapkan adalah Rp 4.150.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 4.309.073.589.585.
- c. Tahun 2015 target yang ditetapkan adalah Rp 4.800.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 4.911.609.520.175.
- d. Tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 5.300.932.973.143.
- e. Sedangkan pada tahun 2017, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 5.130.000.000.000 dan realisasinya adalah Rp 5.889.832.877.975.

4.2 Pembahasan

Jika dilihat dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, penerimaannya baik karena seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya di wilayah Bandar Lampung. Jika jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat, maka penerimaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor juga akan meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan pajak tersebut, maka dapat membantu penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk menghitung persentase penerimaan atau realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung tahun 2013-2017 yang telah ditargetkan, maka dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

Perhitungan persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut.

$$(\text{realisasi} : \text{target}) \times 100$$

- a. Tahun 2013 = $(\text{Rp } 3.896.189.871.560 : \text{Rp } 3.594.000.000.000) \times 100 = 108,41\%$
Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung tahun 2013 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 108,41%.
- b. Tahun 2014 = $(\text{Rp } 4.309.073.589.585 : \text{Rp } 4.150.000.000.000) \times 100 = 103,83\%$
Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung tahun 2014 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 103,83%.

- c. Tahun 2015 = $(Rp\ 4.911.609.520.175 : Rp\ 4.800.000.000.000) \times 100 = 102,33\%$
 Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung tahun 2015 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 102,33%.
- d. Tahun 2016 = $(Rp\ 5.300.932.973.143 : Rp\ 5.000.000.000.000) \times 100 = 106,02\%$
 Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 106,02%.
- e. Tahun 2017 = $(Rp\ 5.889.832.877.975 : Rp\ 5.130.000.000.000) \times 100 = 114,81\%$
 Dari perhitungan diatas diperoleh persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung tahun 2017 telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 114,81%.

Untuk mengetahui persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung tahun 2013-2017, dapat dilihat pula pada tabel berikut:

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
2013	3.594.000.000.000	3.896.189.871.560	108,41
2014	4.150.000.000.000	4.309.073.589.585	103,83
2015	4.800.000.000.000	4.911.609.520.175	102,33
2016	5.000.000.000.000	5.300.932.973.143	106,02
2017	5.130.000.000.000	5.889.832.877.975	114,81

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung pada tahun 2013 hingga 2017 telah memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor telah memenuhi target yakni sebesar 108,41%. Tahun 2014 mengalami penurunan yakni 103,83%. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan yakni 102,33%. Kemudian meningkat pada tahun 2016 yakni sebesar 106,02% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 yakni sebesar 114,81%. Dalam pemenuhan target Pajak Kendaraan Bermotor, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Bagaimana pemerintah memberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini yang berkewenangan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung telah memberikan kemudahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di gerai minimarket, samsat keliling yang biasanya ada di tempat keramaian seperti pasar, serta samsat corner yang ada di pusat perbelanjaan. Kemudahan transaksi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung semata-mata

untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung juga harus memperhatikan program seperti sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Bandar Lampung bisa lebih maksimal, karena umumnya wajib pajak masih belum patuh dan menyadari akan pentingnya dan besarnya manfaat yang dapat diambil dari pemungutan pajak.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil laporan dan pembahasan mengenai Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung

Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya berbeda, hal ini dikarenakan setiap tahunnya rencana pembangunan dan rencana anggaran dari pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Target dari Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung kemudian diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung untuk direalisasikan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan target yang telah ditentukan dengan berbagai program, seperti sosialisasi ke masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, SAMSAT Keliling, SAMSAT Drive Thru, pembayaran pajak melalui gerai supermarket, E-Smart, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayarannya sekaligus untuk mewujudkan target yang ditetapkan. Realisasi dari pajak tersebut sudah sangat baik, mengingat dari tahun 2013 hingga 2017 realisasinya cenderung mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2013 mampu memenuhi target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 108,41%, tahun 2014 103,83%, tahun 2015 102,33%, tahun 2016 106,02%, dan tahun 2017 114,81%. Hal ini tentunya berkat kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah yang berhasil mewujudkan realisasi penerimaan pajak daerah, sehingga berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung

Pengelolaan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat mengingat adanya otonomi daerah, sehingga daerah memiliki wewenang untuk memanfaatkan aset yang dimiliki daerah itu sendiri untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak Kendaraan Bermotor

memiliki kontribusi sebesar 33,65% pada tahun 2013, tahun 2014 sebesar 29,84%, tahun 2015 sebesar 31,89%, tahun 2016 sebesar 33,51%, dan tahun 2017 sebesar 34%. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). jenis pajak tersebut merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk terus digali. Pajak tersebut diharapkan mampu untuk terus meningkat penerimaannya sehingga akan meningkatkan pembangunan nasional berdasarkan otonomi daerah. Penerimaan dari k jenis pajak tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan fisik dan non fisik bagi Provinsi Lampung sehingga fasilitas, pelayanan, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dalam proses penggalian dan pengelolaan dana untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), masyarakat harus dilibatkan dalam pemungutan pajak, retribusi, dan lain-lain yang menjadi komponen PAD. Pemerintah harus terbuka dan tranparansi dalam dalam penggunaan dana PAD digunakan untuk apa saja, sehingga rasa kepercayaan masyarakat Provinsi Lampung dapat meningkat sehingga akan berimbas baik kepada pemerintah daerah tersebut. Imbas baik yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah dengan adanya keterbukaan dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana, masyarakat semakin giat dan teratur dalam membayarkan kewajibannya yaitu berupa pajak, retribusi, dan lain-lain.
2. Bagi masyarakat Lampung diharapkan bisa bekerjasama dengan baik dengan pemerintah daerah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan penerimaan pajak yang baik, maka pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan dan pembangunan yang baik pula untuk fasilitas masyarakat.
3. Bagi akademis diharapkan mampu memberikan hal yang baru dalam perkembangan ekonomi terhadap pemerintahan daerah sehingga pemerintah mampu untuk menjalankan program-program pengalokasian dana PAD dengan jujur, transparan, rapi, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diakses pada tanggal 3 Oktober 2020.

Badan Pusat Statistik. 2015. "Statistik Transportasi Darat Tahun 2015". Diakses pada tanggal 3 Oktober 2020.

Banga, Wempy. 2017. Administrasi Keuangan Negara dan Daerah. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Basya, Mohammad Fahmi, Kusni Hidayati, dan Widya Susanti. "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua terhadap Pendapatan Asli Kota Surabaya". Dalam Jurnal yang diakses pada 2 November 2019.

